

PENGARUH FRAUD DIAMOND TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAMBI PERIODE 2014 - 2018

Akun Fadly ¹⁾
Ilham Wahyudi ²⁾
Susfa Yetti ³⁾

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

^{2&3}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

Email: akunfadly96@gmail.com¹⁾, ilham_wahyudi@unja.ac.id²⁾, susfa_yetti@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the influence of diamond fraud (pressure, opportunity, rationalization, and capability) on financial statement fraud in the public sector. The population used in this study is the district and city governments in Jambi Province. The total sample is 55 District and City Governments obtained through the convenience sampling method. This study uses secondary data taken from the 2014-2018 Audit Board of the Audit Board. Analysis of the data used in this study is multiple regression analysis with the help of SPSS 22. The results of the study found that simultaneous variables affect the financial statement fraud with a coefficient of determination of 22,8%. Partially, the pressure variable does not affect the financial statement flow, the opportunity variable influences the financial statement fraud, the rationalization variable influences the financial statement fraud and the capability variable does not affect the financial statement fraud.

Keywords: pressure, opportunity, rationalization, capability, financial statement fraud

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh *fraud diamond* (tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas) terhadap kecurangan laporan keuangan di sektor publik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Total sampel adalah 55 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diperoleh melalui metode convenience sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan 2014-2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 22. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan variabel berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dengan tingkat koefisien determinasi sebesar 22,8%. Secara parsial, variabel tekanan tidak berpengaruh terhadap kecuran laporan keuangan, variabel kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, variabel rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dan variabel kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, kecurangan laporan keuangan

1. PENDAHULUAN

Kecurangan adalah semua ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas milik atau hak orang lain. Dalam konteks pengauditan laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang di sengaja mengandung kesalahan penyajian (Jusup, 2018)

Fraud tidak selalu sama dengan tindak kriminal. *Fraud* yang bukan kriminal masuk kategori risiko operasional, sedangkan *fraud* yang sekaligus tindak kriminal masuk kategori risiko ilegal. Tindak kriminal didefinisikan sebagai *an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies. Sementara itu fraud didefinisikan sebagai any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another*. Tindakan *fraud* dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak (Kennedy dan Siregar, 2017).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan Negara, perusahaan, kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian ACFE pada tahun 2016, perusahaan di dunia mengalami kerugian rata-rata 5% setiap tahunnya karena perbuatan *fraud* atau rata-rata kerugian yang dialami tiap kasus sebesar \$2,7 juta. Hasil survei ACFE tahun 2016, menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi sebesar 77%, penyalahgunaan aktiva/kekayaan organisasi sebesar 19%, dan kecurangan laporan keuangan sebanyak 4% (ACFE, 2016).

Kasus kecurangan sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Di instansi pemerintah, kasus kecurangan tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang surplus. Selain itu kecurangan bisa juga terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang (Ristianingsih, 2016).

Fraud diamond merupakan suatu pandangan baru mengenai fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Wolfe dan Hermanson menyatakan bahwa secara keseluruhan *Fraud Diamond* merupakan penyempurnaan dari *Fraud Triangle*. Adapun elemen-elemen dari *Fraud Diamond Theory* yaitu:

Tekanan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban (*leverage*) dan pencapaian target realisasi anggaran Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

Kesempatan adalah transaksi pihak berelasi (Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) dan kelemahan sistem pengendalian internal Kusuma, Perdana dan Suranta (2017)

Rasionalisasi merupakan proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam pencapaian target output, dan outcome membuka jalan menuju dorongan atau pemahaman pemerintah daerah, yang dapat mengarah pada rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Alasan pemerintah daerah melakukan kecurangan pelaporan keuangan karena telah terjadi sejak tahun anggaran sebelumnya, kemudian menjadi rasionalisasi Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

Kapabilitas melibatkan kemampuan dari kepala daerah. Pergantian kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena kebijakan – kebijakan kepala daerah sebelumnya dianggap kurang efektif dan efisien dalam mengatasi *fraud* Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

Fenomena kecurangan (*fraud*) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi atas Sistem Pengendalian Internal, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat di telusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp.7.875.342.930,45 dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 4.586.353.593,00 di Kota Jambi (LHP BPK Perwakilan Jambi, 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi atas Sistem Pengendalian Internal, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan Perbedaan nilai aset tetap tanah pada neraca dengan DBMD sebesar Rp. 11,66 Miliar, 13 bidang tanah belum di ketahui luasnya dan di catat dengan nilai Rp. 00, 28

bidang tanah sebesar Rp. 1,16 Miliar tercatat ganda dan 25 bidang tanah sebesar Rp. 1,28 Miliar belum dapat di pastikan pencatatannya dalam KIB ADBDMD di Kabupaten Merangin (LHP BPK Perwakilan Jambi, 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi atas Sistem Pengendalian Internal, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan kesalahan belanja dan jasa serta pemberian remunerasi pegawai pada rumah sakit umum Nurdin Hamzah Tanjung Jabung Timur tidak diatur dengan peraturan Bupati sebesar Rp. 2.30 Miliar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LHP BPK Perwakilan Jambi, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris faktor - faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan khususnya Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi dengan menggunakan *fraud diamond*. *Fraud diamond* merupakan pengembangan dari *fraud triangle*. *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). Elemen-elemen dari *fraud diamond* sebenarnya sama dengan elemen-elemen yang terdapat dalam *fraud triangle*, yaitu *Pressure*, *Oppurtunity*, *Rationalization* tetapi pada *fraud diamond* ditambahkan elemen *capability* sebagai penyempurnanya. *Capability* sebagai elemen pembaharuan dari *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson mampu mencegah terjadinya fraud. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari penipuan dalam Annisya (2016)

Penelitian terdahulu tentang kecurangan laporan keuangan telah diteliti oleh banyak peneliti baik pada sektor swasta maupun sektor publik. Penelitian Kusuma, Perdana dan Suranta (2017) yang berjudul *Fraudulent financial reporting by district/municipal government in Indonesia* menemukan bahwa faktor tekanan (target keuangan proksi dengan persentase penyerapan anggaran) memiliki efek negatif pada kecurangan pelaporan keuangan; faktor kesempatan (terkait transaksi dengan pihak yang ditunjukkan oleh transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan kelemahan pengendalian internal proksi oleh Temuan SPI LHP BPK) berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan; faktor kemampuan yang diprosikan oleh substitusi kepala daerah memiliki efek positif pada kecurangan pelaporan keuangan. Sementara itu, faktor tekanan (*pressure* eksternal proksi dengan rasio kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban (*leverage*) dan faktor rasionalisasi ditunjukkan oleh Opini Non-Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun sebelumnya tidak mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan.

Aini, Prayudi dan Diatmika (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, rasionalisasi berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian Oktarigusta (2017) menggunakan *M Score Model* yang ditemukan oleh Beneish tahun 1999. Penelitian ini menggunakan variabel *financial stability* dengan proksi perubahan aset (ACHANGE), *financial presure* dengan proksi *Return On Asset* (ROA), *external presure* dengan proksi *Leverage* (LEV), *nature of industry* dengan proksi *Receivable* (REC), efektifitas pengawasan dengan proksi jumlah komisaris independen (BDOUT), rasionalisasi dengan proksi *Total Acrual to Total Asset* (TATA), dan *capability* dengan proksi perubahan direksi (DCHANGE). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 2 variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu efektifitas pengawasan dengan proksi jumlah komisaris independen (BDOUT) dan rasionalisasi dengan proksi *Total Acrual to Total Asset* (TATA), sedangkan variabel lainnya dalam penelitian ini yaitu *financial stability*, *financial presure*, *external presure*, *nature of industry*, dan *capability* tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Annisya, Lindrianasari dan Asmaranti (2017) menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan yang diukur dengan rasio perubahan total aset menunjukkan pengaruh positif terhadap laporan keuangan penipuan. Penelitian ini tidak menemukan tekanan eksternal variabel yang diukur dengan *rasio leverage*, target keuangan yang diukur dengan *return on asset*, sifat industri yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, *opini audit* yang diukur dengan mendapatkan *opini* wajar tanpa pengecualian dengan bahasa mengklarifikasi, dan *capability* diukur dengan perubahan direksi pengaruh pada laporan keuangan penipuan

Berdasarkan hasil penelitian Purwanto, Mulyadi dan Anwar (2017) diperoleh bahwa *pressure*, *opportunity*, *rationalization* dan *capability* secara simulatan berpengaruh terhadap *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintahan Kota Bogor. Artinya semakin tinggi faktor-faktor tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga membuktikan bahwa teori *fraud diamond* masih relevan digunakan untuk mengidentifikasi faktor; tekanan, kesempatan, ungkapan pembenaran dan kemampuan yang memotivasi seseorang melakukan *fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor, disamping kolusi dalam memicu terjadi *fraud*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *Pressure*, *opportunity*, *rationalization* dan *capability* berpengaruh terhadap *fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Bogor. *Pressure* memiliki hubungan negatif terhadap *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang artinya semakin meningkatnya *pressure*/tekanan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka semakin menurun tingkat terjadinya *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bogor, sedangkan *opportunity*, *rationalization* dan *capability* memiliki hubungan positif terhadap *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang artinya semakin meningkatnya *opportunity*, *rationalization* dan *capability* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka semakin meningkat pula tingkat terjadinya *fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bogor

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TINJAUN HIPOTESIS

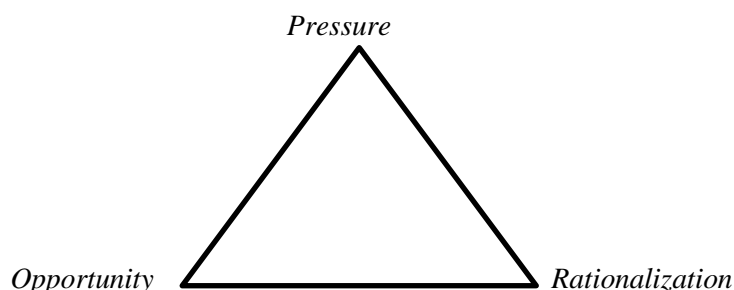
2.1. *Fraud*

Pengertian *fraud* sangat luas yang dapat dilihat dari beberapa kategori kecurangan. Menurut Badan Pengawas Keuangan (2008) secara umum, unsur-unsur dari kecurangan adalah: harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*), dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*), fakta bersifat material (*material fact*), dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*), dan yang merugikannya (*detriment*).

Menurut *Statement on Auditing Standards* No. 99 mendefinisikan *fraud* sebagai “*an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit*”. Sedangkan menurut menurut *Black’s Law Dictionary* dalam Prasetyo *et al.* (*Peak Indonesia*, 2003), *fraud* didefinisikan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu (Kennedy dan Siregar, 2017)

2.2. Teori *Fraud triangle*

Cressey (1953) dalam Skousen *et al.* (2008) memperkenalkan *fraud triangel* yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Adapun tiga elemen yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu:



Gambar 2. *The Fraud Triangle Theory* oleh Donald Cressey (1953)

1. Tekanan (*pressure*).

Tekanan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban (*leverage*) dan pencapaian target realisasi anggaran Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

2. Kesempatan (*Opportunity*)

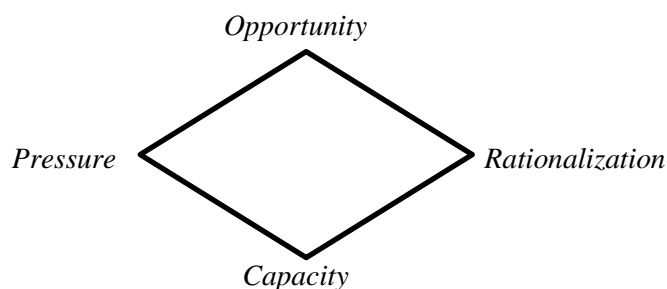
Kesempatan adalah transaksi pihak berelasi (Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) dan kelemahan sistem pengendalian internal Kusuma, Perdana dan Suranta (2017)

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan proses pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam pencapaian target output, dan outcome membuka jalan menuju dorongan atau pemahaman pemerintah daerah, yang dapat mengarah pada rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Alasan pemerintah daerah melakukan kecurangan pelaporan keuangan karena telah terjadi sejak tahun anggaran sebelumnya, kemudian menjadi rasionalisasi Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

2.3. Teori *Fraud Diamond*

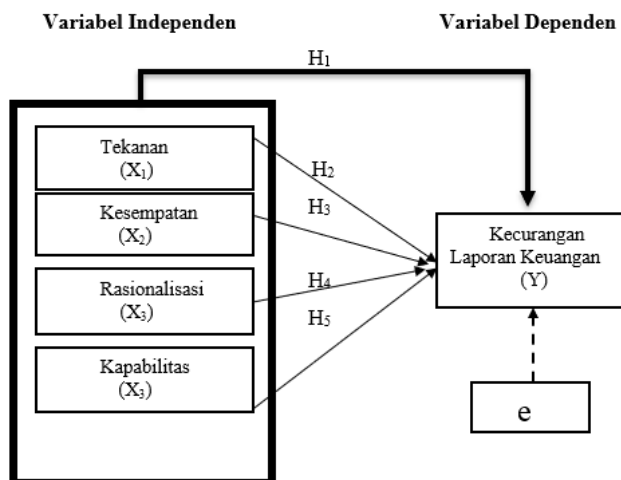
Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan tiga kondisi yang ditemukan oleh Cressey (1953, dalam Skousen *et al.*, 2008) berupa faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecurangan, dengan elemen kemampuan (*capability*). Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari penipuan. Adapun sifat-sifat yang dijelaskan Wolfe dan Hermanson (2004) terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: *Position / function, brains, confidence / ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress*.



Gambar 2. *The Fraud Diamond Theory* oleh Wolfe & Hermanson (2004)

Kapabilitas melibatkan kemampuan dari kepala daerah. Pergantian kepala daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena kebijakan – kebijakan kepala daerah sebelumnya dianggap kurang efektif dan efisien dalam mengatasi fraud Kusuma, Perdana dan Suranta (2017).

3. METODE



Gambar 3. Model Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya (Sunyoto, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2014 – 2018. Sumber data diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi yang beralamat di Jalan Jl. Pangeran Hidayat Km. 6,5 No.65, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Suka Karya, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 2018). Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 9 Kabupaten dan 2 Kota. Sampel adalah sebagian dari elemen - elemen populasi (Indriantoro & Supomo, 2018). Apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua (Arikunto, 2013). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi yang berjumlah 11 Pemerintah daerah. Berikut disajikan pada tabel 1 nama pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Kerinci
2.	Kabupaten Merangin
3.	Kabupaten Sarolangun
4.	Kabupaten Batanghari
5.	Kabupaten Muaro Jambi
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8.	Kabupaten Bungo
9.	Kabupaten Tebo
10.	Kota Jambi
11.	Kota Sungai Penuh

4. HASIL

4.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel – variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tekanan (X1)	55	.0000	.035	.00722	.007928
Kesempatan (X2)	55	11.75	12.11	11.9950	.07887
Rasionalisasi (X3)	55	.012	.193	.09960	.044040
Kecurangan Laporan Keuangan (Y)	55	.048	3.001	.41150	.460414
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Output SPSS, 2020

Tabel 2 di atas menunjukkan data minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel penelitian ini. Variabel tekanan memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 0,035. Nilai rata-rata tekanan sebesar 0,00722 dengan standar deviasi sebesar 0,007928.

Variabel Kesempatan memiliki nilai minimum 11,75 dan nilai maksimum 12,11. Nilai rata rata kesempatan adalah 11,9950 dengan standar deviasi sebesar 0,07887. Variabel rasionalisasi memiliki nilai minimum 0,012 dan nilai maksimum 0.193. Nilai rata rata rasionalisasi adalah 0.09960 dengan nilai deviasi sebesar 0,044040.

Variabel kapabilitas menggunakan skala dummy sehingga dijelaskan menggunakan statistik frekuensi. Berikut hasil statistik frekuensi variabel kapabilitas disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Frekuensi Kapabilitas (X4)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.0	49	89.1	89.1	89.1
	1.0	6	10.9	10.9	100.0
	Total	55	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS, 2020

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa variabel kapabilitas terdiri dari dua skor, yaitu skor 0 dan 1. Skor 0 memiliki arti tidak ada pergantian kepala daerah sedangkan skor 1 memiliki arti adanya pergantian kepala daerah. Pergantian kepala daerah di Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi selama periode 2014 – 2018 terjadi sebanyak 6 kali atau 10,9% sedangkan sisanya sebanyak 49 kali atau 89,1% tidak terjadi pergantian kepala daerah.

4.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan. Dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.167	8.603		3.623	.001
	Tekanan	13.668	7.149	.235	1.912	.062
	Kesempatan	-2.550	.719	-.437	-3.546	.001
	Rasionalisasi	-2.736	1.347	-.262	-2.031	.048
	Kapabilitas	.013	.188	.009	.069	.945

a. Dependent Variable: y

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel 4 di atas menunjukkan persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$KLK = 31,167 + 13,668TKN - 2,550KSMPTN - 2,736RSSN + 0,13 KPBLTS$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 31,167 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari keempat variabel independen dan faktor lain, maka variabel kecurangan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi sebesar 31,167 satuan.

2. Koefisien regresi variabel Tekanan bernilai 13,668 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan tekanan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kecurangan laporan keuangan sebesar 13,668 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi variabel kesempatan bernilai -2,550 (negatif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Kesempatan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kecurangan laporan keuangan sebesar 2,550 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Koefisien regresi variabel Rasionalisasi bernilai -2,736 (negatif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan rasionalisasi sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kecurangan laporan keuangan sebesar 2,736 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
5. Koefisien regresi variabel kapabilitas bernilai 0,13 (positif). Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kapabilitas sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kecurangan laporan keuangan sebesar 0,13 satuan tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

4.3. Pengujian Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Hasil uji F pengaruh variabel manajemen laba, profitabilitas, kebijakan dividen, dan *leverage* secara simultan terhadap variabel kinerja perusahaan disajikan pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.266	4	.816	4.990	.002 ^b
	Residual	8.181	50	.164		
	Total	11.447	54			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, Log_x2

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 4,590 dan nilai signifikansi pengujian di atas sebesar $0,004 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini membuktikan bahwa variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. (**H₁ diterima**).

b. Uji t (Parsial)

Hasil uji t atau uji parsial pengaruh variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.167	8.603		3.623	.001
	Tekanan	13.668	7.149	.235	1.912	.062
	Kesempatan	-2.550	.719	-.437	-3.546	.001
	Rasionalisasi	-2.736	1.347	-.262	-2.031	.048
	Kapabilitas	.013	.188	.009	.069	.945

a. Dependent Variable: y

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil uji t yang ditunjukkan tabel 4.5 di atas bahwa variabel tekanan (X1) memiliki nilai t hitung 1,912 dan nilai sig. 0,062. Nilai sig. 0,062 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₂ ditolak**).

Nilai t-hitung variabel kesempatan (X2) nilai t hitung -3,546 dan nilai sig. 0,001. Nilai 0,001 < 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₃ diterima**).

Nilai t-hitung variabel rasionalisasi (X3) nilai t hitung -2,031 dan nilai sig. 0,048. Nilai 0,048 < 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₃ diterima**).

Nilai t-hitung variabel kapabilitas (X4) nilai t hitung 0,69 dan nilai sig. 0,945. nilai 0,945 > 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. (**H₄ ditolak**).

d. Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2014). Dari uji determinasi dihasilkan nilai *adjusted R²* sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 ^a	.285	.228	.404507

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, Log_x2

Sumber: diolah oleh Peneliti

Tabel 7 di atas menunjukkan hasil uji determinasi bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,228 yang mengandung arti bahwa 22,8 % besarnya kecurangan laporan keuangan bisa dijelaskan oleh variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas sedangkan sisanya 77,2 % lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti fraud pentagon Aprilia (2017).

5. PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi

Penelitian ini menguji empat hipotesis. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis kedua hingga keempat pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan.

a. Pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap kecurangan laporan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai nilai F hitung 4,990 dan nilai signifikansi pengujian di atas sebesar 0,002 < 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini membuktikan bahwa variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga H₁ dalam penelitian ini diterima.

Hasil dari persentase pengaruh variabel independen secara simultan terhadap kecurangan laporan keuangan menunjukkan hasil uji determinasi bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,228 yang mengandung arti bahwa 22,8 % besarnya kecurangan laporan keuangan bisa dijelaskan oleh variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas, sedangkan sisanya 77,2 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti pentagon fraud pentagon Aprilia (2017).

b. Pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan nilai t-hitung variabel tekanan (X1) memiliki nilai t hitung 1,912 dan nilai sig. 0,062. Nilai sig. 0,062 > 0,05 ($\alpha = 5\%$) Hasil ini menjelaskan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₂ ditolak**).

Tekanan tidak berpengaruh terhadap timbulnya kecurangan dalam laporan keuangan, khususnya pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Data penelitian menunjukkan bahwa tekanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi tidak besar, sehingga tekanan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini terlihat dari indikator tekanan yang diukur dari besarnya kewajiban/liabilitas yang dimiliki Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan total aset. Total kewajiban pemda berkisar antara Rp 0 hingga Rp 76 miliar, sedangkan aset pemda berkisar antara Rp 1,05 triliun hingga Rp 3,8 triliun. Perbandingan kewajiban dengan aset pemda secara persentase menghasilkan angka yang sangat kecil yaitu 0,74%. Hal ini menandakan bahwa tekanan yang terlalu kecil dari sisi kewajiban dapat diabaikan, sehingga faktor tekanan bukan menjadi faktor yang mendorong Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma, Perdana dan Suranta (2018) yang menyatakan bahwa tekanan yang di proksikan dengan leverage tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan menunjukkan bahwa rasio rata-rata kewajiban untuk aset Pemerintah Kabupaten/Kota kecil atau di bawah 1%, semakin kecil kewajiban Pemerintah/Kota maka lebih kecil resiko kegagalan untuk mengembalikan kewajiban

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Andriana (2015) yang menyatakan tekanan yang di proksikan leverage berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan diman besarnya gap antara kewajiban dengan aset daerah mengidentifikasi tata kelola pemerintahan tidak dalam keadaan sehat. Oleh karena itu pihak eksekutif pun akan memiliki preasure untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan misalnya menaikan nilai aset untuk mengimbangi jumlah kewajiban pemerintah daerah

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 2003) dalam *Statement on Auditing Standar* (SAS) No.99, menyebutkan bahwa terdapat empat kategori risiko *fraud* dari faktor tekanan, yaitu: stabilitas finansial, tekanan eksternal, kebutuhan finansial personal, dan target finansial. Murdock (2008) dalam Kassem & Higson (2012), berpendapat bahwa tekanan dapat berupa tekanan finansial, non finansial, politis, dan sosial. Tekanan politis dan social terjadi ketika manusia merasa tidak boleh terlihat gagal terkait status dan reputasi mereka.

Menurut Tiffani & Marfuah (2015), tekanan eksternal merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Menurut SAS No. 99, saat tekanan berlebihan dari pihak eksternal terjadi, maka terdapat risiko kecurangan terhadap laporan keuangan. Tekanan finansial kemungkinan menjadi motif manajemen melakukan *fraud* (Kirkos *et al.* (2007)). Skousen, C.J. *et al.* (2009), Lou & Wang (2011), dan Liou (2008) menyatakan bahwa salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan eksternal adalah *leverage*.

Sementara itu pada sektor publik, penelitian yang dilakukan Perwita Sari (2010) menunjukkan bahwa semakin besar leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal.

c. Pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Nilai t-hitung variabel kesempatan (X2) nilai t hitung -3,546 dan nilai sig. 0,001. Nilai 0,001 < 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₃ diterima**).

Kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Semakin tinggi jumlah pendapatan transfer dari pihak pusat ke daerah maka semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang tinggi tentunya akan mengurangi terjadinya kecurangan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian andriana (2015) yang menyatakan variabel kesempatan ini tidak memungkinkan di teliti lebih jauh kaitannya dengan kemungkinan kecurangan

laporan keuangan karena hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia menerima pendapatan transfer dari pihak pusat.

Transaksi pihak istimewa yang rumit yang disertai dengan risiko inheren tinggi karena keterlibatan tinggi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan subjektivitas. Selain itu, transaksi dengan pihak istimewa yang kompleks dapat menimbulkan risiko salah saji material akibat kecurangan karena rentan terhadap manipulasi oleh manajemen. Lou dan Wang (2009) berpendapat bila persentase yang lebih tinggi dari transaksi kompleks muncul, perusahaan menemukan probabilitas yang lebih besar dari kecurangan.

Dalam studi kasus, Young (2005) menemukan bahwa transaksi dengan pihak yang diduga mempunyai hubungan istimewa tersebut digunakan untuk memanipulasi laba, penjarahan perusahaan, dan melakukan kecurangan. Sejak perusahaan terutama beroperasi dengan pengakuan pendapatan sebagai *window dressing* untuk menggambarkan hasil operasi GAO (2002) dalam Palmrose et al., (2004). Dalam penelitian ini dengan obyek pemerintah kabupaten/kota maka kesempatan diukur dengan transaksi pihak istimewa, yaitu dengan pemerintah pusat dari total pendapatan transfer.

d. Pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Nilai t-hitung variabel rasionalisasi (X3) nilai t hitung -2,031 dan nilai sig. 0,048. Nilai $0,048 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (**H₃ diterima**).

Penelitian ini menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi berbicara tentang integritas yang dimiliki oleh aparatur. Semakin tinggi integritas yang dimiliki aparatur, maka aparatur akan semakin menghindari untuk berlaku curang dan sebaliknya. Rasionalisasi ini juga berbicara tentang membenaran diri. Apabila seseorang tahu bahwa tindakannya keliru telah melakukan suatu kecurangan namun memiliki membenaran diri yang tinggi, maka orang tersebut tidak akan merasa bersalah ketika sudah berlaku curang. Hal ini disebabkan oleh moral yang dimilikinya rendah atau juga dapat disebabkan oleh lingkungan yang supportif. Kondisi kecurangan pada pemerintah daerah beberapa waktu belakangan ini tidak dilakukan secara pribadi, namun kolektif. Hal ini dapat berarti bahwa membenaran diri bisa muncul dari diri sendiri atau orang lain yang juga terlibat.

Penelitian sejalan dengan penelitian Sihombing dan Rahardjo yang menyatakan rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Vermeer (2003) menyatakan bahwa total akrual merupakan cerminan dari aktivitas perusahaan keseluruhan. Tingkat akrual perusahaan akan beragam tergantung dari keputusan manajemen terkait kebijakan tertentu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Salsabila (2019) yang menyatakan rasionalisasi yang diprosikan dengan rasio total akrual dan total aset (TACC) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Unsur ketiga pendeteksi *fraud* dalam teori *fraud* adalah *rationalization* (rasionalisasi). Beberapa peneliti pernah mengungkapkan pengertian dari rasionalisasi. Kassem dan Higson (2012) menyebutkan rasionalisasi sebagai membenaran atas perilaku curang sebagai akibat dari kurangnya integritas karyawan atau berkaitan dengan alasan moral lainnya. Sementara Reskino dan Anshori (2016) mengatakan rasionalisasi merupakan kecurangan yang disebabkan oleh adanya indikasi manajemen karena memiliki kepentingan eksklusif dalam menjaga atau meningkatkan harga saham atau tren laba entitas.

Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur rasionalisasi adalah total akrual. Francis dan Krishnan (1999) berpendapat bahwa prinsip akrual berkaitan dengan pengambilan keputusan manajemen dan juga memberikan pemahaman rasionalisasi dalam pelaporan keuangan. Akuntansi berbasis akrual berarti pencatatan dilakukan berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan arus kas semata. Prinsip akrual ini dianggap sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena lebih rasional dan adil. Namun prinsip akrual ini dapat digunakan untuk mengubah laba yang dihasilkan, sehingga terindikasi sebagai tindakan kecurangan laporan keuangan (Septriani dan Handayani, 2018). Pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan ataupun pengeluaran saat terjadinya transaksi dengan menaikkan ataupun menurunkan nilai transaksi, meskipun kas belum dikeluarkan atau diterima (Oktarigusta, 2017).

Husmawati *et al* (2017) mengatakan bahwa nilai akrual bukanlah nilai riil, sehingga manajemen dapat memainkan akrual perusahaan untuk mendapatkan nilai yang diharapkan. Sehingga akrual dapat digunakan oleh manajemen sebagai alasan untuk membenarkan tindakan manipulasi.

e. Pengaruh kapabilitas terhadap kecurangan laporan keuangan

Nilai t-hitung variabel kapabilitas (X4) nilai t hitung 0,69 dan nilai sig. 0.945. Nilai $0,945 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil ini menjelaskan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. (**H₄ ditolak**).

Penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kapabilitas yang diukur melalui pergantian kepala daerah ternyata tidak membawa perubahan berarti pada penurunan kecurangan laporan keuangan. Hal ini terkait dengan budaya yang dibawah oleh kepala daerah baik yang lama maupun yang baru. Indonesia menurut hasil survei *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2018 menempati peringkat 89 dari 168 dengan nilai 34 (Nilai 0 = tingkat korupsi tertinggi, nilai 100 = sangat bersih). Skor 34 yang diperoleh Indonesia menunjukkan bahwa budaya *fraud* di Indonesia telah menyebar baik di swasta maupun di pemerintahan. Budaya *fraud* ini dapat menjangkit aparat yang ada di birokrasi pemerintahan di Indonesia, meskipun tidak berarti bahwa semua pejabat memiliki budaya *fraud* ini.

Pergantian kepala daerah di pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jambi harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas *fraud*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian kepala daerah belum mampu mengatasi masalah *fraud* laporan keuangan, sehingga kepala daerah yang baru namun tidak memiliki budaya yang baik dan komitmen kuat belum dapat mengatasi masalah ini.

Data keuangan menunjukkan bahwa baik pada pemerintah daerah yang melakukan pergantian kepala daerah atau tidak melakukan, opini laporan keuangannya hampir 100% mendapatkan opini WTP selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian kepala daerah bukan merupakan suatu faktor penentu opini audit dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, opini WTP tidak menjamin hilangnya kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP belum dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Kondisi ini dapat dijelaskan lewat kebiasaan atau budaya organisasi Kepala daerah yang baru dan kepala daerah yang lama umumnya merupakan orang yang setempat dengan budaya yang sama sehingga pergantian kepala daerah atau tidak melakukan pergantian kepala daerah

Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Sihombing dan Radharjo (2017) yang menyatakan kapabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan hal tersebut terjadi apabila pemangku kepentingan tertinggi di pemerintahan daerah menginginkan adanya perbaikan kinerja dengan cara merekrut jajaran pegawai yang dianggap lebih berkompeten daripada masa pimpinan kepala daerah sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Indriana (2015) yang menyatakan kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang menyimpulkan bahwa setiap terjadi pergantian kepala daerah akan berpotensi munculnya kebijakan-kebijakan baru tentang pengelolaan keuangan yang dapat mengarah pada kecurangan laporan keuangan.

Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014).

Selain itu, Wolfe & Hermanson (2004) juga menemukan bahwa pergantian jajaran direksi menjadi “indikasi” terjadinya *fraud*. Pergantian jajaran direksi merupakan bagian dari usaha perusahaan dalam perbaikan kinerja perusahaan akibat kurang efisien dan efektifnya kebijakan direktur sebelumnya. Pergantian direksi juga disinyalir sebagai usaha perusahaan mengeliminasi direksi yang dianggap mengetahui *fraud* yang terjadi di perusahaan. Dalam tatanan pemerintahan daerah, pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia *Chapter*. (2016). *Survei Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.
- Aini N, Prayudi M, Diatmika P. (2017). *Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Vol,8. No,2.
- Annisya. M., Lindrianasari, dan Asmarani, Y. (2016). *Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 23(1), 72–89.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Jambi Tahun 2018
- Indriantoro, N dan Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFPE, Yogyakarta.
- Indra K, Halim Dedy P dan Sri Suranta. (2017). *Fraudulent financial reporting by district/municipal*. Vol,2. No,1. Page 27-48
- Kennedy P, Siregar S. (2017). *Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia*. ISSN – 14103842. Vol,21. No,2.
- Oktarigusta L. (2017). *Analisis Fraud Diamond Untuk Mendeteksi Terjadinya Financial Statement Fraud*. *Jurnal Ekonomi Daan Manajemen Sumber Daya*, Vol.19, No.2.
- Tiffani, Laila dan Marfuah. (2015). *Deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 19, No. 2, 112-125
- Wolfe, David T, and Hermanson, Dana R. (2004). *The fraud diamond: considering the four elements of fraud*. *CPA Journal*. Vol. 74, Issue 12, 1-5.